

ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT LOKAL DI WILAYAH LINTAS BATAS ATAMBUA-TIMOR LESTE

Analysys of UMKM Empowerment on Local Community Income in the Atambua-Timor Leste Cross Border Area

Natalia Gracia Rimelda Ulut^{1,a)}, Paulina Y. Amtiran^{2,b)}, Christien C. Foenay^{3,c)},
Wehelmina M. Ndoen^{4,d)}

^{1,2,3,4)}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} nataliaulut49@gmail.com, ^{b)} paulinaamtiran@staf.undana.ac.id,
^{c)} christienfoenay@staf.undana.ac.id, ^{d)} wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan UMKM merupakan sebuah alternatif untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan pendapatan ekonomi, bentuk pemberdayaan ini seperti pembiayaan, pelatihan dan pendampingan serta perluasan akses pasar. Masalah kemiskinan akan selalu berhubungan dengan masalah pendapatan yang tidak merata. Pendapatan yang diperoleh masyarakat pun bukannya hanya penjualan dalam negeri tetapi juga penjualan ke luar negeri atau biasa di sebut ekspor. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Belu (Atambua) yang merupakan daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste yang cukup strategi dalam melakukan sebuah riset terkait pemberdayaan UMKM yang mempengaruhi pendapatan masyarakat lokal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belu sudah cukup baik dalam melakukan pemberdayaan UMKM terlihat bahwa banyaknya pelaku usaha baru yang mendaftar dan adanya peningkatan penghasilan yang diperoleh masyarakat dari hasil ekspor serta peningkatan pengujung ke daerah perbatasan.

Kata Kunci : Analisis SWOT, Pemberdayaan UMKM, dan Pendapatan

PENDAHULUAN

Daerah perbatasan menjadi daerah yang sangat strategis dalam pelaksanaan perdagangan antar dua negara, tentunya dari kondisi ini maka akan menimbulkan potensi-potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adalah dengan dilakukannya pemberdayaan UMKM. (Wedhaninggar, 2015).

UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dalam kondisi apapun, seperti terjadinya krisis global. Pada peristiwa tersebut semua sektor yang lain sedikit terganggu, akan tetapi untuk UMKM sendiri tetap bertahan. Hal inilah yang menjadi suatu keunggulan atau potensi terutama wilayah perbatasan untuk bisa memberdayakan UMKM agar memperoleh hasil produksinya itu menjadi komoditas-komoditas ekspor.

Dengan kurangnya peran UMKM dan masih minimnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka setiap program pemberdayaan UMKM tidak semata-mata dilakukan hanya dengan satu bentuk pemberdayaan, melainkan dengan berbagai bentuk pemberdayaan seperti. Pembiayaan (fasilitas pinjaman modal usaha dan bantuan modal usaha bagi wirausaha

pemula), Pelatihan/penguatan kapasitas dan Pendampingan (coaching atau mentoring), dan Perluasan akses pasar. Oleh karena itu, berdasarkan 3 indikator tersebut merupakan sebuah strategi pemberdayaan UMKM yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (TNP2K & Indonesia, 2021).

Masalah kemiskinan akan selalu berhubungan dengan masalah pendapatan yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi terus menerus tidak selalu mengatasi masalah tingkat kemiskinan yang tidak berkorelasi positif dengan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh masyarakat pun bukan hanya penjualan atas barang dan jasa dalam negeri tetapi juga dapat melalui penjualan barang dan jasa ke luar negeri atau disebut dengan ekspor, dalam melihat nilai ekspor maka diperlukan sebuah indikator yaitu perluasan akses pasar untuk meningkatkan keberhasilan pendapatan masyarakat. Secara umum ekspor-impor termasuk dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang dengan menggunakan perhitungan Ekspor Neto. Ekspor Neto ini merupakan sebuah nilai ekspor yang dilakukan oleh suatu negara dalam periode satu tahun tertentu dengan dikurangi nilai impor dalam periode yang sama (Priyono & Teddy, 2016).

Hasil penelitian Yuniarti (2019) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya tiap UMKM menghadapi permasalahan yang hampir sama yaitu faktor teknologi, permodalan, pengelolaan bahan baku dan pemasaran yang belum bisa berdaya saing di era global. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat dominan dalam pengembangan UMKM di wilayah IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), tetapi dalam kegiatannya masih menghadapi beberapa kendala atau hambatan terutama yang menyangkut masalah anggaran, teknologi dan promosi. Dan hasil penelitian Amtiran dkk (2022) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan dan meningkatkan inovasi UMKM di wilayah perbatasan perlu dilakukannya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada UMKM hal ini dilakukan agar mengembangkan usaha yang dijalankan dan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga mempertahankan usaha.

Salah satu wilayah perbatasan yang cukup potensial di Indonesia adalah wilayah Kabupaten Belu yang berada di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kabupaten Belu banyak menghasilkan komoditas-komoditas yang sangat potensial baik itu dari sektor pertanian, furniture, pertambangan dan lainnya. Jika dilihat berdasarkan potensi yang terdapat pada wilayah perbatasan Kabupaten Belu dan Timor Leste tentu sangat membuka peluang bagi para pelaku UMKM dalam melakukan aktivitas perdagangan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal untuk keluar dari persoalan kemiskinan dalam lingkungan masyarakat dan tidak harus menunggu bantuan dana dari pemerintah daerah. Namun justru masyarakat dapat mengembangkan SDM dan memanfaatkan SDA itu sendiri untuk menjadi penghasilan yang menguntungkan sehingga dapat diekspor ke Timor Leste.

Pada observasi awal masih terlihat beberapa hambatan yang umumnya yang dialami para pelaku UMKM dan pemerintah Kabupaten Belu yaitu terkait penanganan pemberdayaan seperti pembiayaan, pelatihan dan pendampingan serta perluasan akses pasar yang akan mempengaruhi pendapatan masyarakat Kabupaten Belu. Masalah di atas harus dilakukan sebuah pemberdayaan UMKM yang tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan tetapi juga guna mensejahterakan rakyat.

Dengan adanya masalah dalam kegiatan UMKM maka pada penelitian ini dapat menjadi penghubung antara analisis pemberdayaan UMKM dengan mengambil beberapa indikator pembiayaan, pelatihan dan pendampingan, dan perluasan akses pasar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal di wilayah lintas batas Indonesia (Kabupaten Belu)-Timor Leste dengan menggunakan perhitungan EFAS dan IFAS analisis SWOT, perhitungan tersebut yang menjadi akhir dalam melihat strategi program pemberdayaan UMKM dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Belu. Maka dengan itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul “Analisis Pemberdayaan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal di Wilayah Lintas Batas Atambua-Timor Leste”. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat menjadi perbandingan untuk penelitian berikutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan (Hanim Lathifah, 2018) Maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah sebuah alternatif yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Mengingat peran UMKM dan masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghindari sebuah masalah dalam pengembangan bisnis dan mempermudah pemerintah dalam mendata maka perlu adanya perizinan mendirikan usaha (Syarief, 2020).

Menurut TNP2K bentuk pemberdayaan UMKM, dikelompokkan menjadi 4 kelompok pemberdayaan, yakni:

1. Pembiayaan, baik dalam bentuk tunai, pemberian fasilitas pinjam modal usaha dengan skema kredit atau dana bergulir ataupun bantuan subsidi bunga pinjaman modal.
2. Pelatihan dan Pendampingan (coaching/mentoring). Dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan keterampilan berwirausaha hingga pembekalan sistem pelaporan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan melalui program-program yang disertai pemberdayaan reguler oleh pendampingan maupun pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu UKM.
3. Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk seperti: Bantuan pemasaran produk dan informasi pasar, akses ke e-commerce, fasilitas penataan lokasi usaha, peluang, peta usaha, bantuan alat/perengkapan usaha, atau revitalisasi sarana dan prasarana ditempat usaha, sertifikat dan standardisasi produk (ekspor, merek/kemasan, sertifikat halal, dan SNI), fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual produk, dan pembinaan kemitraan dan jaringan usaha.

Pendapatan

Menurut Safri (2018) bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Dalam sistem perhitungan pendapatan nasional itu dinamakan produk nasional neto pada harga. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi pada negara tersebut dalam satu tahun tertentu atau nilai barang dan jasa pada suatu negara yang diproduksi oleh faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Atau pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan output yang dihasilkan dalam batas wilayah geografis suatu negara, baik yang dihasilkan oleh warga negara tersebut maupun negara asing yang tinggal di negara tersebut (Syaiful et al., 2022). Produk Domestik Bruto (PDB) menghitung sebuah perhitungan ekspor dan impor yang masuk pada pendapatan nasional yaitu Ekspor Neto. Ekspor Neto ini merupakan sebuah nilai ekspor yang dilakukan oleh suatu negara dalam periode satu tahun tertentu dengan dikurangi nilai impor dalam periode yang sama. Hasil ekspor yang dilakukan dalam negeri berupa barang dan jasa. Oleh karena itu, nilainya harus dihitung ke dalam pendapatan nasional (Priyono & Teddy, 2016).

Analisis SWOT

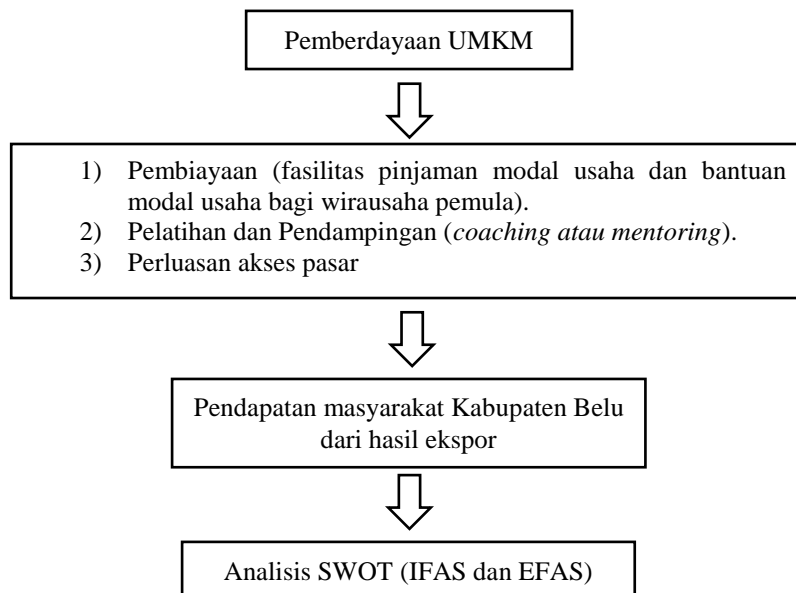
SWOT adalah salah satu alat analisis yang sangat populer dan sederhana dalam menganalisis faktor internal maupun faktor eksternal. Alat analisis walau sangat sederhana namun jika digunakan dengan tepat akan memberikan manfaat. Teknik SWOT akan menganalisis faktor internal dan eksternal seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi organisasi maupun produk (Sanjaya & Nuratama, 2021)

KERANGKA BERPIKIR

Dalam penulisan ini mengambil indikator penelitian dalam melakukan pemberdayaan UMKM dengan mengambil beberapa indikator yaitu pembiayaan, pelatihan dan pendampingan serta perluasan akses pasar yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor sehingga dapat melihat hasil pendapatan masyarakat Kabupaten Belu yang telah dijelaskan

pada bab II. Beberapa Indikator diatas menjadi sebuah persoalan dalam mengentaskan pemberdayaan UMKM berdasarkan observasi awal di Kabupaten Belu.

Indikator tersebut dilakukan sebuah analisis SWOT dengan perhitungan IFAS dan EFAS. Pemberdayaan ini tentu dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, PLBN dan Bea Cukai Kabupaten Belu yang merupakan sebuah hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku UMKM dalam hal ini pendapatan.



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik analisis data SWOT. Teknik analisis SWOT akan menganalisis faktor internal dan eksternal seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Lokasi penelitian dalam penulisan ini di Kabupaten Belu yang merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Informan penelitian ini adalah kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Bea Cukai dan Kepala PLBN Kabupaten Belu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses komunikasi langsung dengan metode FGD (*Fokus Group Discussion*) dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Belu

Dari hasil penelitian, peneliti mengambil beberapa keberhasilan dalam pemberdayaan UMKM yaitu pembiayaan dan pelatihan & pendampingan melalui sosialisai serta menjelaskan kendala yang dialami.

1. Pembiayaan

Bentuk pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tentu pemerintah harus memberikan sebuah dukungan bagi masyarakat dengan diberikan pembiayaan modal usaha agar dapat membantu mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dapat membantu masyarakat untuk terus berinovasi dalam

bisnis, digunakan sebagai dana darurat, dan digunakan untuk menyewa tempat usaha. Pada tahun 2022 terdapat 303 pelaku usaha mikro yang menerima bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Belu. Berikut tabel.1 dibawah ini.

Tabel 1.
Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2022

Program/Kegiatan	Penerima Bantuan Modal Usaha	Total Dana Diterima	Ket
Program Pengembangan UMKM/Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	303 pelaku usaha mikro	Rp 1.515.000.000,-	2022

Sumber: *Dinas Koperasi dan UKM, 2022*

Pada tabel 1 diatas, 302 penerimaan bantuan dana usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Belu bersumber dari dana APBN II, bantuan sebesar Rp 1.515.000.000 ini diberikan kepada UMKM Kabupaten Belu seperti perternak (ayam dan babi), kios-kios kecil, warung makan, tenun ikat, salon, perbengkelan, furniture, dan toko bakery dengan masing-masing menerima bantuan dana usaha sebesar Rp.5.000.000. Tujuan bantuan dana usaha ini untuk mengurangi resiko sosial dari guncangan ekonomi dan menanggulangi dampak kenaikan harga BBM.

Hal ini menjadi kendala dari pemberdayaan UMKM dalam hal pembiayaan, seperti sulitnya mendapat data UKM, sulitnya verifikasi, kesulitan evaluasi penggunaan dana, jumlah pengajuan yang kurang/lebih dari kuota yang disediakan dan baru membentuk usaha agar mendapatkan bantuan.

2. Pelatihan dan pendampingan

Startegi pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan akan tetapi juga pengoptimalan SDM masyarakat yang merupakan komponen penting untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan UMKM pada Kabupaten Belu. Untuk meningkatkan SDM maka pemerintah Kabupaten Belu melakukan sebuah pendampingan dan pelatihan dalam bentuk sosialisasi bagi pelaku usaha untuk membantu akan pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi dan para stakeholder dapat berbagi, dan mengetahui cara mengelola keuangan.

Program pemberdayaan UMKM dengan bentuk pelatihan, pembinaan dan sosialisasi tidak pula menjamin masyarakat untuk mengikuti aturan yang disampaikan serta kurang optimalnya program pemberdayaan UMKM sehingga menjadi sebuah kendala pada SDM seperti kurangnya tenaga kerja profesional dalam pembinaan, minimnya dalam pemanfaatan handphone dan minimnya kegunaan dana bantuan usaha. Faktor lain yang menjadi kendala dari hasil pengamatan yaitu kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pembinaan oleh pemerintah daerah dan minimnya SDM pelaku usaha tentang perlunya mengikuti pembinaan.

Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Belu

Setelah melakukan penelitian yang berkaitan dengan keberhasilan dari strategi pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, penulis menyajikan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat Kabupaten Belu yang disebabkan oleh perluasan akses pasar dengan melihat penyediaan sarana dan prasarana yang mempengaruhi aktivitas ekspor, sehingga dengan hal itu bisa terlihat angka pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekspor.

Agar mempermudah masyarakat daerah perbatasan untuk berinteraksi maka diperlukan sebuah akses untuk masuk dan keluar bagi masyarakat kedua negara dan akses pasar. Hal ini tentu menjadi peluang besar untuk kedua negara dari segi ekonomi seperti kemudahan ekspor-impor, kemudahan dalam mengontrol keluar masuknya barang dari dua negara, dibukanya pasar perbatasan yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli, penyerapan tenaga kerja dan mengenal budaya antarnegara. Peluang akses yang diberikan Bea Cukai juga diberlakukan oleh BNPP dengan bentuk dibangunnya Pos Lintas Batas Negara Kabupaten Belu seperti dibukanya pasar perbatasan yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli, penyerapan tenaga kerja dan mengenal budaya antarnegara.

Dalam melakukan perluasan akses pasar maka harus diimbangi dengan adanya pembangunan sarana dan prasana yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur. Melalui hasil observasi yang dilakukan peneliti, infrastruktur di Kabupaten Belu terbilang cukup baik. Pemerintah Daerah telah berhasil membangun sarana dan prasarana ekonomi seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi penghubung antara masyarakat Indonesia-Timor Leste serta membangun dan menyediakan Pasar Motaain yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli kedua negara. Hal ini sangat memudahkan masyarakat antarnegara untuk berinteraksi serta melancarkan kegiatan perekonomian (ekspor-impor) di daerah Kabupaten Belu.

Pada pasar Motaain terbagi dalam 2 area yang disediakan yaitu area food court dan area lapak. Pada area food court terdapat 7 stan/kios yang disewakan dengan luas masing-masing 5,27 m². Sedangkan, pada area lapak terdapat 188 lapak tetapi 98 lapak belum terisi dan 90 lapak sudah terisi. Sarana perdagangan di Kabupaten Belu selain wilayah Pos Lintas Batas terdapat juga pasar, toko, kios dan warung pada Kabupaten Belu berdasarkan data (Perkim.id, 2022). Berikut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten Belu

Jenis	Jumlah	Persentasi
Pasar	20	0,91%
Toko	1.901	86,96%
Kios	19	0,87%
Warung	246	11,25%
Jumlah	2.186	100,00%

Sumber: *Perkim.id*, 2022

Pada Tabel 2 diatas menjelaskan bawah telah disediakan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang diberikan pemerintah Kabupaten Belu yang terdiri dari pasar, toko, kios dan

warung dengan jumlah keseluruhan 2.186, dan yang paling banyak merupakan sarana berupa toko dengan jumlah 1.901.

Dengan adanya perluasan akses pasar hal ini juga menjadi sebuah peningkatan dalam berwirausaha yang membuat masyarakat Kabupaten Belu lebih berinovasi dalam pengembangan usaha sehingga masyarakat Kabupaten Belu dapat berlomba-lomba untuk bersaing dalam melakukan ekspor ke negara Timor Leste. Pendapatan masyarakat Kabupaten Belu saat ini sangat meningkat sejak adanya kegiatan ekspor ke Timor Leste, hasil yang mereka peroleh bukan hanya berasal dari penjualan di dalam negeri namun juga penjualan ke luar negeri. Berikut dapat dilihat pada tabel 3 neraca perdagangan RI-RDTL Ekspor-Impor.

Tabel 3.
Neraca Perdagangan RI-RDTL

Ket	Tahun					
	2019		2020		2021	
	Nilai (US \$)	Share (%)	Nilai (US \$)	Share (%)	Nilai (US \$)	Share (%)
Ekspor	16,279,934.15	92,07%	15,865,544.70	94,59%	20,818,774.37	92,38%
Impor	1,401,556.00	7,93%	906,612.00	5,41%	1,718,279.00	7,62%
Neraca	14.88 Jt	Surplus	14.96 Jt	Surplus	19.10 Jt	Surplus

Sumber: *Disperindag Kab. Belu, 2022 (Amtiran et al., 2022)*

Berdasarkan neraca perdagangan pada tabel 3 diatas dari sisi ekspor untuk tahun 2019 nilai ekspor lebih besar dibandingkan tahun 2020. Tahun 2019 sebesar US \$20,818,774.37 sedangkan tahun 2020 sebesar US \$15,865,544.70. Hal tersebut dipicu oleh wabah Covid-19 sehingga pemerintah daerah Kabupaten Belu dan Timor Leste menutup sementara pintu perbatasan. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali nilai ekspor sebesar US \$20,818,774.37. Hal ini, pintu perbatasan dibuka kembali setelah meredanya wabah Covid-19. Terdapat juga data hasil ekspor-impor dari Bea cukai yang menunjukkan angka ekspor-impor Indonesia-Timor Leste. Berikut tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4.
Data Ekspor dan Impor Maubel & Pangan

EKSPOR 2021-2023		
Tahun	Komoditi	Devisa
2021	Maubel	1,867,779.00
	Pangan	834,530.00
2022	Maubel	4,453,910.60
	Pangan	15,859,204.00
2023	Maubel	2,097,110.94
	Pangan	6,112,006.00
IMPOR 2021-2023		
Tahun	Komoditi	Devisa
2021	Maubel	–
	Pangan	1,711,940.00
2022	Maubel	1,920.00
	Pangan	2,650,588.00
2023	Maubel	–
	Pangan	321,368.00

Berdasarkan tabel 4 diatas jenis komoditi yang di ekspor dan di impor yaitu maubel dan pangan (hasil pertanian, peternakan dan perkebunan). Pada tahun 2021 kabupaten Belu mengekspor maubel sebesar 1,8 Jt sedangkan tahun 2021 tidak ada maubel yang di impor dari Timor Leste. Ekspor impor Pangan tahun 2021 nilai ekspor < impor. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan pada ekspor maubel senilai 4,4 Jt dalam hal ini tahun 2022 nilai ekspor > impor, begitu pun pada ekspor impor pangan tahun 2022 nilai ekspor > impor. Tahun 2023 terdapat kegiatan ekspor maubel senilai 2 jt namun tahun 2023 tidak ada maubel yang masuk dari Timor Leste ke Kabupaten Belu. Dan pada 2023 kegiatan ekspor impor pada pangan terjadi peningkatan, dimana nilai ekspor > impor, nilai ekspor sebesar 6,1 Jt dan nilai impor sebesar \$321.368.00. Dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian, peternakan dan perkebunan masyarakat Kabupaten Belu dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan dilihat dari nilai ekspor yang diterima.

Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan beberapa hal yang menjadi yang menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat yaitu ada peningkatan nilai ekspor terlebih khusus ekspor pada pangan dari hasil (perkebunan, pertanian dan peternakan) milik masyarakat Kabupaten Belu.

Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan alat analisis sederhana dalam menentukan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dipengaruhi oleh faktor pembiayaan, pelatihan dan pendampingan, dan perluasan pasar pada upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Belu yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat Kabupaten Belu.

Berikut tabel 5 Penilaian analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan terhadap faktor internal (Pembiayaan & Pelatihan dan Pendampingan) dalam pemberdayaan UMKM.

Tabel 5.
Faktor Internal (pembiayaan dan pelatihan & pendampingan)

Faktor Internal				
Kekuatan		Bobot	Rating	Skor
Pembiayaan	Membantu mengembangkan usaha	0.08	4	0.32
	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	0.05	4	0.2
	Berinovasi dalam bisnis	0.06	4	0.24
	Sebagai dana darurat	0.04	4	0.16
	Menyewa tempat usaha	0.04	3	0.12
Pelatihan & Pembinaan	Pengetahuan akan penggunaan teknologi	0.06	4	0.24
	Berbagi pengalaman antar stakeholder	0.05	4	0.2
	Mengetahui cara mengelola keuangan	0.04	3	0.12
	Meningkatkan produktivitas	0.05	4	0.2
	Mampu bersaing dengan kompetitor	0.05	4	0.2
Jumlah		0.52		2
Kelemahan		Bobot	Rating	Skor

Pembiayaan	Sulit mendapatkan data UKM	0.05	2	0.1
	Kesulitan verifikasi	0.04	2	0.08
	Kesulitan evaluasi penggunaan dana	0.04	3	0.12
	Jumlah pengajuan yang kurang/lebih dari kuota	0.05	2	0.1
Pelatihan & Pembinaan	Baru membentuk usaha agar mendapatkan bantuan	0.04	2	0.08
	Kurangnya tenaga kerja profesional dalam pembinaan	0.04	3	0.12
	Minimnya SDM dalam pemanfaatan teknologi pada pelaku UMKM	0.05	2	0.1
	Minimnya SDM dalam penggunaan dana bantuan usaha	0.05	2	0.1
	Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pembinaan oleh dinas-dinas terkait	0.06	2	0.12
	Masih kurangnya minat dan kesadaran dari pelaku usaha bahwa perlu mengikuti pembinaan.	0.06	2	0.12
Jumlah		0.48		1.04
Total		1.00		3.04

Sumber: Olah Data, 2023

Hasil analisis IFAS pada faktor internal (pembiayaan & pelatihan dan pendampingan), dapat disimpulkan bahwa jumlah skor pada kekuatan sebesar 2. Sedangkan jumlah skor pada kelemahan sebesar 1.04, selisih skor antara kekuatan dan kelemahan sebesar 0,96. Dengan total keseluruhan pada dua faktor tersebut sebesar 3,04. Berikut tabel 6 Penilaian analisis SWOT yang terdiri dari peluang dan ancaman terhadap faktor eksternal (perluasan akses pasar) dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Belu.

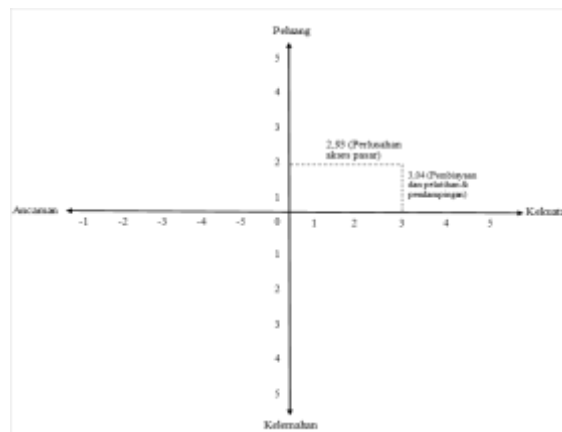
Tabel 6.
Faktor Eksternal (perluasan akses pasar)

Faktor Eksternal				
	Peluang	Bobot	Rating	Skor
Perluasan Akses Pasar	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	0.08	4	0.32
	Mengurangi pengangguran	0.05	3	0.15
	Mengentaskan kemiskinan	0.05	4	0.2
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	0.05	4	0.2
	Meningkatkan produktivitas	0.04	3	0.12
	Kemudahan ekspor impor	0.08	3	0.24
	Kemudahan dalam mengontrol keluar masuknya barang dari dua negara	0.04	3	0.12
	Dibukanya pasar perbatasan yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli	0.05	4	0.2
	Penyerapan tenaga kerja	0.05	4	0.2
	Mengenal budaya antarnegara	0.04	3	0.12
Jumlah		0.53		1.87

	Ancaman	Bobot	Rating	Skor
Perluasan Akses Pasar	Kerusakan infrastruktur seperti kerusakan alam dan punahnya satwa	0.04	3	0.12
	Bencana alam yang mengakibatkan kerusakan	0.04	3	0.12
	Kelompok masyarakat yang nakal	0.04	3	0.12
	Kurangnya ketersediaan sarana warung akibat meningkatnya pengunjung	0.08	2	0.16
	Kurangnya perhatian pemerintah terkait sarana dan prasarana	0.05	2	0.1
	Imigrasi ilegal	0.04	2	0.08
	Ketergantungan masyarakat dengan daerah perbatasan	0.04	2	0.08
	Penyebaran penduduk tidak merata	0.04	2	0.08
	Penyeludupan barang	0.05	2	0.1
	Perdagangan ilegal	0.05	2	0.1
	Jumlah	0.47		1.06
	Total	1.00		2.93

Sumber: Olah Data, 2023

Hasil analisis EFAS pada faktor eksternal (Perluasan akses pasar) yang mempengaruhi pendapatan masyarakat Kabupaten Belu, dapat disimpulkan bahwa jumlah skor pada peluang sebesar 1,87. Sedangkan jumlah skor pada ancaman sebesar 1,06 selisih skor antara peluang dan ancaman sebesar 0,81. Dengan total keseluruhan pada dua faktor tersebut sebesar 2,93. Berikut gambar 4.4 grafik Strategy Factors Analysis Summary (SFAS).



Gambar 2.

Grafik Strategy Factors Analysis Summary (Sfas)

Berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EFAS ditemukan selisih skor pada kekuatan dan kelemahan pada matriks IFAS sebesar 3,04. Sedangkan selisih skor peluang dan ancaman sebesar 2,93.

Secara umum, analisis dalam penelitian ini yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pemberdayaan UMKM yang mempengaruhi pendapatan masyarakat kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel Matriks SWOT berikut.

Tabel 7.
 Matriks SWOT

<p>EFAS</p> <p>IFAS</p>	<p>STRENGTHS (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas 2. Kualitas hidup 3. Inovatif 4. Dana darurat 5. Berbagi pengalaman dan pengetahuan 	<p>WEAKNESS (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan mendapatkan data UKM, verifikasi dan evaluasi penggunaan dana 2. Jumlah pengajuan yang kurang/lebih dari kuota dan pelaku UKM yang baru membentuk usaha 3. kurangnya tenaga kerja 4. Minimnya SDM 5. Kurangnya minat kesadaran pentingnya pembinaan dan pelatihan
<p>OPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas 2. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Kemudahan ekspor impor dan transaksi jual beli 5. Penyerapan tenaga kerja dan pengenalan budaya antar negara 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan program pemberdayaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2. Memfokuskan kegiatan pelatihan dan pembinaan dengan teknologi yang tersedia 3. Terus melakukan hubungan kerja sama antar <i>stakeholders</i> dalam pemberdayaan UMKM 4. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur 5. Terus pengoptimalan kemudahan ekspor 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan proses pendataan dan verifikasi pada UKM 2. Mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja
<p>THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan alam dan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam 2. Kelompok masyarakat yang nakal 3. Kurangnya perhatian dalam penyediaan sarana dan prasana 4. Imigrasi ilegal, penyeludupan dan perdagangan ilegal. 5. Ketergantungan masyarakat pada daerah perbatasan dan penyebaran penduduk yang tidak merata 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi fasilitas pendeteksi cuaca, iklim dan bencana 2. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pendampingan masyarakat untuk menghindari transaksi atau kegiatan ilegal 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan UMKM dan pengembangan sosial-ekonomi

Sumber: Olah data, 2023

Berdasarkan diagram SWOT posisi berada pada kuadran I, ini menjadi sebuah strategi yang kuat dan berpeluang dalam upaya pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, karena rekomendasi strategi yang diberikan progresif yang berarti strategi (S-O) dengan memungkinkan strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mempertahankan kualitas program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Belu.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemerintah daerah kabupaten Belu sudah cukup baik dalam melakukan pemberdayaan UMKM terlihat bahwa banyaknya pelaku usaha baru yang terdaftar dan peningkatan penghasilan yang diperoleh masyarakat dari hasil ekspor serta peningkatan pengunjung dari negara Timor Leste sehingga membuat warung makanan dan usaha penginapan pada daerah perbatasan ramai pengunjung. Keberhasilan yang diperoleh bukan semata hanya tentang pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut pemberdayaan. Namun, program pemberdayaan ini harus profesional dan terus berkomitmen serta memberikan sebuah kemudahan dalam kegiatan ekspor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Belu.

Hasil penelitian pada faktor internal (pembiayaan & pelatihan dan pendampingan) menjelaskan bahwa pemberian modal usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dapat membantu mengembangkan usaha yang berawal dari kios kecil menjadi sebuah toko, serta dana bantuan usaha yang dapat dijadikan sebagai darurat yang sewaktu-waktu kekurangan modal usaha dan dana tersebut tentu dapat menjadi dana dalam membantu pembayaran sewa tempat usaha. Selain itu, pemberian dana bantuan usaha dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dalam bisnis. Hal dasar yang menjadikan keberhasilan dalam pemberdayaan UMKM yaitu sumber daya manusia, melalui pelatihan dan pembinaan dapat meningkatkan pengetahuan akan teknologi. Bertemunya, sesama pelaku usaha dalam sebuah sosialisasi juga dapat saling berbagi pengalaman antar pelaku usaha agar mampu bersaing dengan kompetitor. Dan dengan meningkatkan SDM tentu dapat juga memberikan peningkatan produktivitas bagi pelaku UMKM.

Hasil penelitian pada faktor eksternal (perluasan akses pasar) Dibukanya akses juga memberikan peluang bagi pelaku usaha menengah dan kecil dengan melibatkan UKM menembus pasar ekspor dan tentu hal ini terlibat dengan perusahaan yang bermodal besar. Pemberian akses juga memberikan sebuah kemudahan ekspor impor serta mengontrol barang yang masuk dan keluar sesuai izin yang berlaku. Seperti dibukanya pasar perbatasan yang akan memungkinkan terjadinya transaksi jual beli serta penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat perbatasan. Disediaknya sarana dan prasarana juga menjadi sebuah peluang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi terkait pendapatan dengan tersedianya lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, meringankan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kembali meningkatkan produktivitas. Seperti adanya porter pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) kabupaten Belu yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Silawan.

Dari hasil analisis IFAS faktor kekuatan dan kelemahan memiliki skor 3,04 yang artinya ini menunjukkan posisi internal yang kuat. Sementara dari hasil analisis EFAS menunjukkan faktor peluang dan ancaman memiliki skor 2,93 artinya bahwa perluasan akses pasar merespon peluang dalam kemudahan ekspor-impor bagi pelaku UKM dan berusaha menghindari ancaman-ancaman. Untuk mengoptimalkan kembali pemberdayaan UMKM. Maka, peneliti memberikan sebuah strategi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada dalam meningkatkan pendapatan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara pemberian modal usaha dan membentuk pelatihan secara berkesinambungan bagi pelaku usaha lama maupun baru.
2. Terus meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dengan diperluaskan kembali pasar perbatasan, mengingat peningkatan pengunjung yang terus terjadi.
3. Mengoptimalkan kembali akses dalam kegiatan ekspor impor agar tidak terjadi penyeludupan barang ilegal.
4. Membangun sebuah sistem monitoring dan evaluasi pada setiap program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan, dimana program pemberdayaan UMKM tidak hanya diperoleh oleh satu penerima program melainkan semua pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan karakteristik UMKM yang cukup beragam.

Empat uraian tersebut perlu adanya dukungan antar *stakeholder* dalam memfasilitasi perdagangan pada daerah perbatasan serta membuat program pemberdayaan UMKM menjadi berkesinambungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mampu menghadapi perubahan kondisi global sehingga pendapatan masyarakat Kabupaten Belu tetap stabil.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan upaya pemberdayaan UMKM di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste Kabupaten Belu sudah cukup optimal, dalam mengembangkan UMKM tentu tidak terlepas dari dukungan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Belu terutama Dinas Koperasi dan UKM dalam penyaluran dana bantuan usaha. selain itu penguatan pendampingan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan akses pasar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta dilakukannya pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat Kabupaten Belu. Hasil analisis IFAS menunjukkan posisi internal yang kuat atau positif pada program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan, dan pada hasil analisis EFAS menunjukkan bahwa adanya perluasan akses pasar merespon peluang bagi pelaku UKM dengan adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat Kabupaten Belu melalui kegiatan ekspor.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran, sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah kabupaten Belu
Perlu adanya pendataan kembali bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan dana bantuan usaha oleh pemerintah daerah dan Dinas Koperasi dan UKM sehingga dapat bersikap adil bagi pelaku usaha lainnya. Serta perluasan pembangunan sarana dan prasana yang ada di lokasi pasar Motaain, mengingat peningkatan pengunjung dan pelaku usaha baru yang berdatangan.
2. Bagi peneliti berikutnya
Dapat mengembangkan penelitian terkait pemberdayaan UMKM terhadap pendapatan masyarakat lokal daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste di Kabupaten Belu yang lebih inovatif dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode purposive.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtiran, P. Y., Anabuni, A. U., & Neno, M. S. (2022). *Cross Border Trade: Strategy And Policy (Evidence From Cross_Border Trade In The Republic Of Indonesia And The Republic Democratic Of Timor Leste)*. Global Academy Of Training & Research (Gatr) Enterprise.
- Hamonangan, S. (2020). *Teori Akuntansi (Pertama)*. Lppm Uhn Press.
- Hanim Lathifah, N. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil,& Menengah) & Bentuk-bentuk Usaha*. Unissula Press.
- Herkulana, Budiman, J. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12.
- Ibrahim, M. (2016). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarindah Ulu Kota Samarinda). *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 256–267.
- Imam, A. (2019). Analisis Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengrajin Tas di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. In *Umng Repository*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Kusnadi. (2017). *Teori Akuntansi*. Universitas Brwijaya Malang.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3.
- Patiung, M., & Taus, W. (2022). Dampak Perdagangan Lintas-Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Penelitian di Wilayah Perbatasan RI-Timor Leste Districk Oecussie). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.
- Perkim.Id. (2022). Profil Pkp Kabupaten Belu. *Perumahan & Kawasan Permukiman*. <https://Perkim.Id/Profil-Pkp/Profil-Kabupaten-Kota/Profil-Perumahan-Dan-Kawasan-Permukiman-Kabupaten-Belu/>
- Pertiwi, Gani, S. (2013). Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1.
- Priyono, & Teddy, C. (2016). *Esensi Ekonomi Makro*. Zifatama Publisher.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23, Pub. L. No. 14, Psak No. 23 1 (2018).
- Safri, H. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi (D. Ilham (Ed.))*. Lembaga Penerbit Kampus Iain Palopo.
- Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2019). *Analisis Swot Dengan Metode Kuesioner*. Pilar Nusantara.
- Sanjaya, P. K. A., & Nuratama, I. P. (2021). *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah (M. Yunus (Ed.))*. Cv. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing dalam Kancan Pasar Global. *Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). *Manajemen Koperasi dan Usah Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Perkembangan Teori, Praktik Dan Strategi*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara Pgri Kediri.
- Syaiful, M., Damanik, D., Saragih, E. C., Fitriani, Nugroho, D. H., Guampe, D. F. A., Hikmah, Poluakan, M. V., Pattimahu, T. V., Sudirman, A., Ladjin, D. N., Sumario, Kundhani, E. Y., & Moridu, I. (2022). *Pengantar Ilmu Ekonomi (H. F. Ningrum (Ed.))*. Penerbit Media Sains Indonesia (Cv. Media Sains Indonesia).
- Syarief, F. (2020). *Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Yayasan Barcode.

- Terry, & Winardi, G. R. (2012). Asas-Asas Manajemen. Alumni.
- Timisela, S. G. (2015). Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Wilayah Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami). Jesp, 7.
- Tnp2k, & Indonesia, L. D. F. E. Dan B. U. (2021). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Edisi Pert). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. [Www.Tnp2k.Go.Id](http://www.Tnp2k.Go.Id)
- Yuniarti, Y. (2019). Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kawasan Indonesia –Malaysia-Thailand (IMT-GT). Ilmu Administrasi Bisnis.